BANTUAN SUBSIDI DISTRIBUSI PANGAN BERDAMPAK POSITIF

Jelang Nataru, Harga Bahan Pokok Dijamin Stabil

YOGYA (KR) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogya maupun DIY menjamin harga bahan pokok menjelang natal dan tahun baru (nataru) tetap stabil. Di samping pasokan yang mencukupi, tingkat konsumsi di masyarakat diharapkan juga tetap wajar atau tidak berlebihan.

Jaminan keamanan pangan dari aspek harga maupun pasokan tersebut dipastikan setelah jajaran TPID Kota Yogya dan DIY melakukan pemantauan di pasar tradisional dan supermarket. "Kami pantau beberapa tempat untuk kesiapan natal dan tahun baru. Kondisinya aman," tandas Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH usai meninjau komoditas pangan yang ada di Pasar Prawirotaman, Jumat (16/12).

Selain jajaran Pemkot Yogya, pantauan tersebut juga diikuti Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY, Bank Indonesia Perwakilan DIY serta Satgas Pangan Polda DIY. Selama di Pasar Prawirotaman, pantauan dikhususkan pada komoditas sayuran, bumbu dapur, minyak goreng, daging ayam dan sapi. Sedangkan di supermarket meliputi ketersediaan pasokan pangan di Superindo Karangkajen Jalan Parangtritis.

Pada kesempatan itu Sumadi dan jajaran mengapresiasi kebersihan di Pasar Prawirotaman. Penataan dagangan atau display milik pedagang juga disesuaikan jenisnya masing-masing. Dengan begitu akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan konsumen yang berbelanja di pasar tradisional. "Kondisi pasar bersih. Bisa menjamin para pelanggan. Tadi ada beberapa komoditas di sini yang lebih murah dibandingkan pasar lain. Walaupun ada juga karena pasokan menjadi agak sedikit tinggi seperti daging ayam. Tetapi rata-rata harga sangat stabil," tandasnya.

Sumadi pun menjamin tingkat ketersediaan bahan pangan sangat terkendali. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan distributor, jika ada peningkatan kebutuhan maka sewaktu-waktu dapat didistribusikan.

Selain rutin memantau pasokan dan harga di pasaran, upaya pengendalian yang dilakukan oleh TPID juga dilakukan melalui bantuan subsidi distribusi atau ongkos kirim. Besaran subsidi ongkos kirim tersebut ialah Rp 2.000 per kilogram, baik yang dilakukan DIY maupun Kota Yogya. Intervensi melalui program bantuan itu pun memberikan dampak positif.

Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Riswanti, menyebut salah satu yang mencolok dan dapat dirasakan ialah harga telur. Dengan adanya bantuan subsidi ongkos kirim maka harga yang ditawarkan ke konsumen saat ini ialah Rp 28.000 per kilogram. "Kalau di luar harganya rata-rata Rp 30.000 per kilogram. Tapi dengan adanya bantuan subsidi ongkos kirim, di sini harga telur Rp 28.000 per kilogram," jelasnya.

KR-Ardhi Wahdan

Pj Walikota Yogya memantau harga pangan di Pasar Prawirotaman bersama jajaran TPID Kota dan DIY.

Tidak hanya telur, seluruh komoditas pangan pun mendapatkan bantuan subsidi ongkos kirim yang diberikan melalui distributor. Khusus untuk Kota Yogya, tahun ini dialokasikan Rp 100 juta dan sudah terserap sepenuhnya. Sedangkan alokasi dari DIY jauh lebih besar karena menggunakan dana insentif daerah. "Bahkan DIY juga memiliki bantuan subsidi distribusi untuk cabai yang di tingkat petani. Tetapi nilainya sekitar Rp 600 per kilogram," katanya. **(Dhi) -f**

UJB Terima 2 Anugerah Diktiristek 2022

YOGYA (KR) - Dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan Anugerah Diktiristek kepada perguruan tinggi yang dinilai telah melakukan akselerasi MBKM, Kamis (15/12) di Jakarta.

Atas usaha dan kerja keras, Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta berhasil mendapatkan dua Anugerah Diktiristek 2022 terkait dengan MBKM. Pertama yaitu Anugerah Penyedia Konten Terbanyak ketiga di Spada Indonesia. Kedua, Anugerah Pelaksana Program Kompetisi Kampus Merdeka Liga 3 Terbaik.†

Anugerah diterima oleh Wakil Rektor I UJB, Erna Sri Wibawanti dalam Malam Anugerah Diktiristek 2022. "Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Universitas Janabadra untuk lebih bersemangat mentransformasikan pendidikan tinggi melalui program MBKM, menyiapkan SDM yang adaptif, unggul, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia," kata Erna.

KR-Istimewa

Erna Sri Wibawanti dan 2 anugerah.

Anugerah Diktiristek ini merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pemberian anugerah ini merupakan apresiasi Ditjen Diktiristek kepada pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, LLDIKTI, jurnalis, media, dan mitra (kementerian, lembaga, serta dunia usaha dan dunia industri), yang telah meraih pencapaian tertinggi dan berkontribusi dalam mendukung implementasi transformasi pendidikan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan Matching Fund). **(Dev)-f**

Pelajar NU Harus Berkemajuan

YOGYA (KR) - Para pelajar Nahdlatul Ulama (NU) di DIY harus berkemajuan dengan mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, pelajar NU juga tidak boleh tercerabut dari akarnya, dan wajib tetap berpegang teguh pada nasab (kekerabatan) dan maqom (kedudukan di depan Allah). Untuk itu pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) DIY yang baru terpilih harus mampu memberikan warna yang baru bagi perjalanan kaum nahdliyin.

"Harapan saya kaum nahdliyin, apalagi yang pelajar bisa berkemajuan, tapi jangan sampai tercerabut dari akarnya. Bagaimana kita harus menghormati kaum tua, dan kita harus menjadi lebih maju. Apalagi sekarang era digital, sehingga nahdliyin muda harus melek digital tapi tetap teguh pada akarnya," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Paku Alam X saat menerima kunjungan Pengurus IPNU DIY di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Jumat (16/12).

Wagub DIY menegaskan, agar pengurus IPNU DIY untuk masa jabatan tiga tahun ke depan bisa menjaga tali silaturahmi dengan pihak manapun. Sebagaimana yang diyakini dalam Islam, silaturahmi dapat membawa berkah. Namun yang ditekankan Paku Alam X, jangan sampai agama menjadi hambatan untuk silaturahmi.

Sementara itu Ketua IPNU DIY, Didi Manarul Hadi mengatakan, kedatangan pengurus IPNU, selain untuk bersilaturahmi dengan Wagub DIY juga ingin meminta kesediaan Sri Paku Alam X hadir pada acara pelantikan pengurus IPNU DIY masa jabatan 2022-2025. **(Ria)-f**

Setapak Langkah Urusan Pertanahan DIY

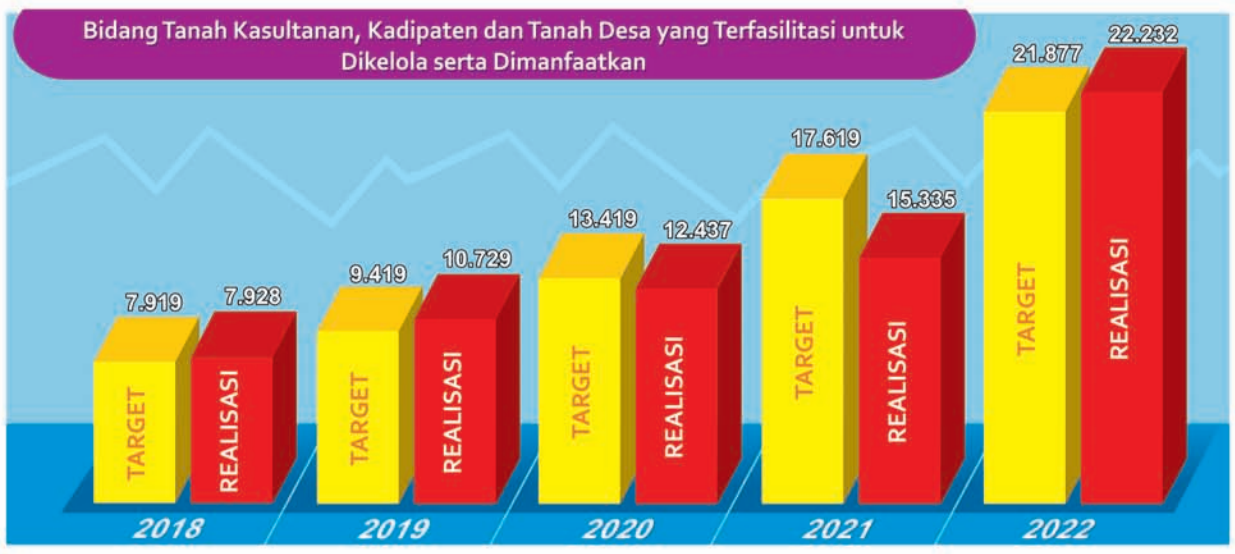

*IKU GUB RPJMD 2017-2022

*Keterangan satuan : Bidang tanah

KEWENANGAN keistimewaan DIY di bidang pertanahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tersebar di Kabupaten/Kota di DIY. Hal ini dipertegas dengan penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Badan Hukum yang memiliki hak atas tanah. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Dimana di dalam aturan itu dijabarkan ruang lingkup Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. "Penatausahaan pertanahan meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Adapun tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Sedangkan tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari,tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh. Yaitu tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan,"kata Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho di Yogyakarta, Kamis (15/12).

Aris mengatakan, adanya Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Hal itu meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Perlu diketahui untuk penatausahaan pertanahan meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon (Dede Keprabon) yang terdapat di seluruh kabupaten/kota. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh. Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa di urusan pertanahan dapat diukur melalui beberapa unsur. Seperti pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten diformulasikan melalui prosentase jumlah bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang sudah didaftarkan. Pemeliharaan dokumen pertanahan, serta pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa. "Perlu diketahui untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diformulasikan melalui Pendaftaran Tanah Desa, jumlah desa yang mempunyai perdes, dan pengajuan permohonan kekancingan yang diajukan dan ditindaklanjuti,"ungkapnya.

Aris mengungkapkan, bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola atau dimanfaatkan termasuk salah satu dari indikator kinerja utama (IKU) Pemda DIY yang tertuang dalam RPJPMD tahun 2017 sampai tahun 2022. Dimana sasaran programnya adalah meningkatnya fasilitas dan pemanfaatan tanah kasultanan maupun kadipaten pakualaman serta tanah desa. Dimana pada tahun 2021 pihaknya menargetkan 17.619 bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Dimana dari target 17.619 bidang terealisasi sejumlah 15.362 bidang dengan prosentase terhadap target tahun 2021 mencapai 87,19 persen. Secara kumulatif pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2021 telah direalisasikan sebanyak 13.737 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022. Sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 1.625 bidang dari target 8.000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian 2020 capaian tersebut meningkat sebesar 17,32 persen. Dengan formulasi indikatornya meliputi prosentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, pemeliharaan dokumen pertanahan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa. Serta fasilitasi tanah desa yang meliputi pendaftaran tanah desa, permohonan pemanfaatan tanah, dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes.

"Capaian prosentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan tersebut merupakan hasil perhitungan realisasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.737 bidang dan 1.625 bidang Tanah Desa dari target keseluruhan 21.877 bidang. Sampai dengan 2021 capaiannya 15.335 bidang untuk mencapai target tahun 2022 sebanyak 21.887 bidang. Kami sepakat pada tahun 2022 mengupayakan realisasi pendaftaran sebanyak 6.552 bidang. Berkat komitmen bersama dan dukungan banyak pihak target tersebut terlampaui karena bisa mencapai 22.232 bidang (101,62 persen),"papar Aris.

Aris menyatakan, meski target yang sudah ditentukan bisa terpenuhi bahkan terlampaui, pihak tidak memungkiri jika sempat mengalami kendala. Diantaranya belum dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap Tanah Desa yang belum bersertipikat. Hal itu dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. "Kantor Pertanahan belum dapat memproses pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum. Untuk itu kami menilai perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan. Terutama berkaitan pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum," jelasnya.

KR-Istimewa

Aris Eko Nugroho

Ditambahkannya, bidang tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi sejumlah 14.044 bidang. Sesuai dengan tahapan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, telah dilakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan pemetaan. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pendaftaran sertifikat terhadap bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Dari 14.044 bidang tersebut yang sudah terdaftar baru sekitar 13.837 jadi masih kurang sekitar 679 bidang tanah. Menurutnya, supaya target yang sudah ditentukan bisa terpenuhi perlu adanya pemahaman mengenai urgensi memelihara dokumen pertanahan. Hal itu penting agar sejarah asal-usul tanah di kalurahan tetap terjaga guna mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Untuk itu pemerintah desa/ Kalurahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan melalui pelaksanaan inventarisasi terhadap seluruh dokumen pertanahan yang dimiliki. Harapannya dalam satu tahun anggaran dapat diselesaikan pemeliharaan seluruh dokumen pertanahan di tiap desa. Jika tidak dimungkinkan, maka Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mengidentifikasi dokumen yang akan diprioritaskan untuk dilakukan perawatan dokumen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan kuota layanan pemeliharaan dokumen dari ANRI. **(Ria)**